



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUNA 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

KATA PENGANTAR

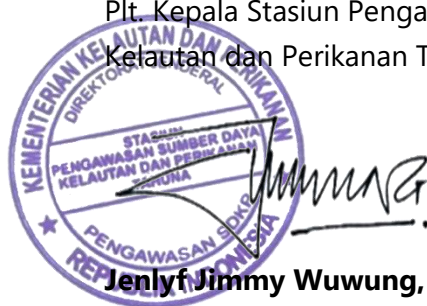
Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2026, yang didalamnya mengandung penjabaran tentang kebijakan strategis dan operasional dengan mengacu kepada draft Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahunan ini memberikan panduan dan pedoman bagi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PSDKP dalam menjalankan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2026.

Adapun pokok bahasan yang perlu diperhatikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2026 ini adalah pelaksanaan program, output dan kegiatan-kegiatan prioritas Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui uraian pokok bahasan tersebut diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat mempedomaninya secara cermat sekaligus memberikan saran dan masukan yang bermanfaat serta dasar pelaksanaan evaluasi kinerja.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2026 ini.

Tahuna, 9 Februari 2026

Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tahuna

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN' at the top and 'DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN' at the bottom. Inside the ring, it says 'STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Jenlyf Jimmy Wuwung, S.Kel

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025	10
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	10
B. Evaluasi Kinerja Tahun 2025	12
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2026	14
A. Tujuan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2026.	14
B. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.	14
C. Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2026	15
D. Rencana Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026	18
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 33/MEN/2016 tanggal 28 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diharapkan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Philipina. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna membutuhkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan proses perencanaan yang setiap tahun dilaksanakan sebagai proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rancangan Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, menggambarkan pedoman kinerja tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode yang sama.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2026 dimaksudkan memberikan acuan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam menselaraskan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2026, adalah :

- 1) Mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan;
- 2) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi;

- 3) Memberikan arah dan kebijakan operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode tahun 2025.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, tugas UPT Stasiun PSDKP Tahuna adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Stasiun PSDKP Tahuna menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit Eselon IVa, UPT Stasiun PSDKP Tahuna dibantu oleh Tim Kerja (Timja) dan Satwas serta Wilker Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial;
2. Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas;
3. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran;
4. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
5. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
6. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Talaud;

a) Wilker Pengawasan SDKP Salibabu;

Penjabaran tugas dan fungsi tim kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial

Tugas:

Melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Koordinasi kegiatan dan laporan kinerja serta pengelolaan data;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengarsipan dan pengaduan masyarakat/WBS;
- d. Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan informasi, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta hubungan masyarakat;
- e. Pengelolaan urusan keuangan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, rumah tangga, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas

Tugas:

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan serta perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal dan *speedboat* pengawas kelautan dan perikanan.

Fungsi:

-
- a. Penyiapan perumusan kegiatan dibidang prasarana dan sarana infrastruktur pengawasan yang menunjang kegiatan penyelenggaraan pengoperasian kapal dan speedboat pengawas kelautan dan perikanan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan dipemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan serta penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan serta penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan serta penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;

3. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di penanganan pelanggaran, awak kapal, barang bukti serta sanksi administratif dibidang kelautan dan perikanan.

Fungsi:

- a. Penyediaan informasi, monitoring dan evaluasi dalam bentuk data pada bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan
- b. Penerapan dan perumusan sanksi administratif dalam penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan
- c. Penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Pelaksanaan operasional di bidang penyidikan, memfasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut.

4. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi dibidang intelijen dan pengawasan sumber daya perikanan.

Fungsi:

- a. Penyediaan informasi, monitoring dan evaluasi dalam bentuk data pada bidang intelijen dan pengawasan sumber daya perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan penangkapan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit pengolahan ikan dan distribusi hasil perikanan
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan penangkapan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit pengolahan ikan dan distribusi hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut barang hasil tindak pengawasan perikanan.

5. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi dibidang intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan.

Fungsi:

- a. Penyediaan informasi, monitoring dan evaluasi dalam bentuk data pada bidang intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan, jenis ikan dilindungi kegiatan perikanan merusak serta keanekaragaman hayati perairan
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau

-
- kecil, produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan, jenis ikan dilindungi kegiatan perikanan merusak serta keanekaragaman hayati perairan;
- d. Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut barang hasil tindak pengawasan kelautan

6. *Satuan Pengawasan Talaud dan 1 (satu) Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Talaud*

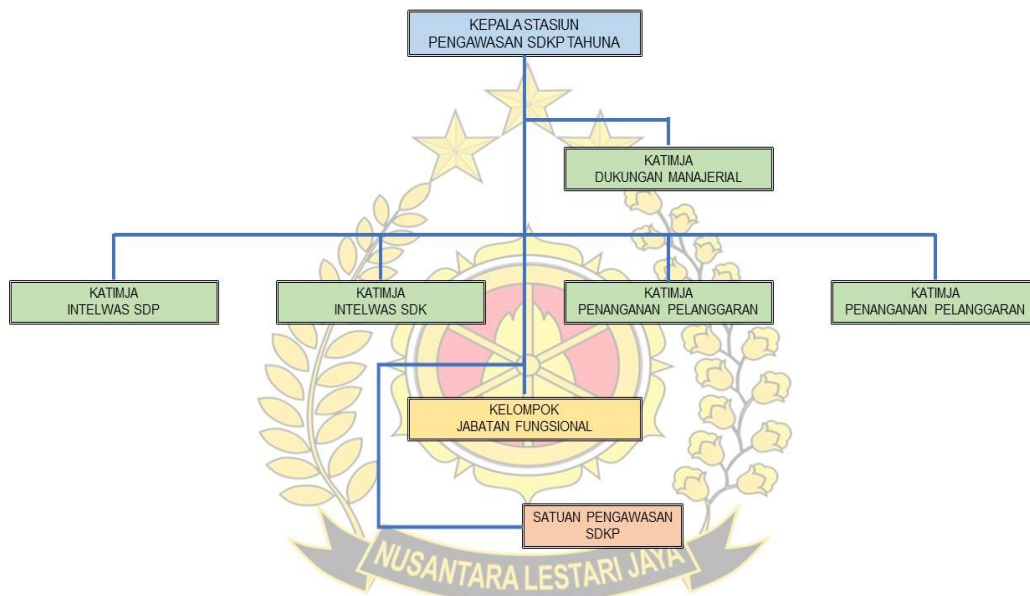
Tugas:

Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perpanjangan tangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
- c. Pelaksanaan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan Speed Boat Pengawasan;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;

Struktur organisasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna terdiri dari Kepala Stasiun (eselon IVa), Kepala Urusan Umum (setara eselon V). Serta Jabatan Non Eselon, yakni Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas, Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan serta Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan.



Gambar Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2026, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan struktur organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.
2. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
Menjelaskan tentang capaian program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.
3. Bab III Rencana Kerja
Menjelaskan tentang rencana kerja program dan kegiatan tahun 2026 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.
4. Bab IV Penutup
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Stasiun PSDKP Tahuna sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka sesuai jenjang hirarki UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja. Maka secara runut dijelaskan perubahan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna sepanjang tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif	1. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan [Nilai];	100,0	100,0
2	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	2. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan [Nilai];	82	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan [Nilai];	82	100
4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara efektif	4. Indeks operasi kapal pengawas [Indeks];	92	96,80
		5. Indeks operasi speedboat pengawas [Indeks];	92	97,50
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP [%];	100	100
5	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	7. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan [indeks];	81	81
		8. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber	81	81

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
		daya kelautan dan perikanan [indeks];		
6	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan [indeks]	81	71
7	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan SDKP	10. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	71,50	84,16
		11. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	92	95,41
		12. Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks];	81	84,59
		13. Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	86	88,90
		14. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];	100	100
		15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%];	95	100
		16. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	80	92,55
		17. Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	75	87,50

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
		18. Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	77	79,73
		19. Nilai implementasi program budaya kerja [Nilai];	70	81,20

Tabel Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025

B. Evaluasi Kinerja Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 mengacu kepada rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki visi “Peningkatan Kualitas Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif di Stasiun PSDKP Tahuna untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.” Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna terhadap perekonomian lokal dan nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna. Pelaporan tersebut sebagai dasar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

Total anggaran tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebesar Rp.13.937.135.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.12.659.396.766,- atau 90,83 %.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2026

A. Tujuan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2026.

Sebagai pelaksana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan penelaahan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada kegiatan prioritas nasional. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang paling mendasar dan mempengaruhi arah kebijakan perencanaan adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaannya tidak hanya mempermudah perizinan yang akan berdampak positif bagi iklim usaha di Indonesia, tapi juga membawa banyak manfaat untuk masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan sebagai stakeholder dalam kegiatan pengawasan.

B. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa informasi terkini yang dijadikan perhatian dalam pemanfaatan SDKP yaitu;

- 1) Bidang Perikanan Tangkap;
 - Terdapat peningkatan IUU Fishing oleh KIA di perairan wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna selama 2 tahun terakhir;
 - Pengawasan Kelautan dan Perikanan di wilayah perbatasan RI-Filipina;
 - Penangkapan ikan di wilayah pesisir oleh kapal perikanan ijin Pusat dan Daerah.
- 2) Bidang Perikanan Budidaya;
 - Masih adanya unit budidaya ikan yang belum terdaftar / teregistrasi;
 - Limbah budidaya ikan yang dihasilkan dan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar;
- 3) Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
 - Banyaknya unit pengolahan ikan yang tidak terdaftar / teregistrasi;
 - Belum adanya sertifikasi HACCP dan SKP dalam Unit Pengolahan yang diperiksa.
- 4) Bidang Distribusi Hasil Perikanan;
 - Kegiatan distribusi yang belum terekplor secara menyeluruh;

5) Bidang Jasa Kelautan dan Destructive Fishing;

- Penambangan pasir laut tanpa izin resmi dari pemerintah pusat;
- Kegiatan perikanan yang bersifat merusak, seperti penyetruman ikan, pembiusan ikan dan penggunaan alat bantu kompresor dalam penangkapan ikan;
- Belum optimalnya kegiatan pemanfaatan pada BMKT di sekitar lokasi;
- Belum terlaksananya pengawasan pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

C. Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2026

Sesuai dengan arah kebijakan, strategi pelaksanaan pengawasan serta kegiatan prioritas nasional bidang Kelautan dan Perikanan yang perlu diwujudkan pada tahun 2026, maka terdapat 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan.

KODE	PROGRAM / AKTIVITAS / KRO	TARGET	PAGU (ribuan)
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		9.179.640
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana		8.426.866
2350.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	75 Hari Operasi	184.650
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	75 Hari Operasi	5.216.690
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 Unit	3.025.526
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		535.299
2351.BCE	Penanganan Perkara	9 Perkara	535.299
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		135.515
2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	1 Operasi	57.225
2352.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	1 Laporan	2.806
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	31 Lembaga	75.484
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan		81.960
2353.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4 Kelompok	81.960
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen		6.456.262
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		6.456.262

KODE	PROGRAM / AKTIVITAS / KRO	TARGET	PAGU (ribuan)
2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit	15.000
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan	6.416.785
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM	2 Orang	3.917
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 Dokumen	20.560

Tabel Program, Aktivitas dan KRO Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2026

Berdasarkan tabel redesain program, aktivitas dan anggaran tahun 2026 di atas, maka disusunlah Sasaran Kinerja dan Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang berpedoman pada draft Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tahuna 2025-2029, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berikut penjabaran sasaran kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1.	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas [Indeks];	83
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2.	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan [Nilai];	100
		3.	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan [Nilai];	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4.	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan [Nilai];	83
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5.	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan [Nilai]	83
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	6.	Indeks operasi kapal pengawas [Indeks];	92,25
		7.	Indeks operasi speedboat pengawas [Indeks];	92,25
		8.	Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana / armada pengawasan SDKP [indeks];	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan [Indeks];	82
		10.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan [indeks];	82
7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [Indeks]	82
8	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	81,75
		13.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	92,1
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	81,5
		15.	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	88,2
		16.	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tahuna [%];	100
		17.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%];	86
		18.	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	88,8
		19.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP [Nilai];	75
		20.	Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	78
		21.	Nilai implementasi program budaya kerja [Nilai];	71

D. Rencana Pencapaian Target Kinerja Kegiatan 2026

Berdasarkan dokumen kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2026, terdapat 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 21 (dua puluh satu) indikator kegiatan yang meliputi:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif.

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini terdiri dari Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok masyarakat pengawas dengan target nilai 83 didapat dari pelaksanaan pembinaan 4 (empat) kelompok;

2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif.

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini terdiri dari:

- a) Nilai kualitas operasi intelijen kelautan dengan target nilai 100 didapat dari pelaksanaan 1 (satu) kegiatan operasi;
- b) Nilai kualitas operasi intelijen perikanan dengan target nilai 100.

3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Indikator Kinerja (IK) untuk sasaran kegiatan ini terdiri dari nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan dengan target nilai 83 didapat dari hasil penilaian pemeriksaan untuk 4 Pelaku Usaha;

4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan.

Indikator Kinerja (IK) untuk sasaran kegiatan ini terdiri dari nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan dengan target nilai 83 didapat dari hasil penilaian pemeriksaan untuk 27 Pelaku Usaha;

5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif.

Indikator Kinerja (IK) untuk sasaran kegiatan ini terdiri dari:

- a) Indeks operasi kapal pengawas dengan target 92,25 didapat dari pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas Hiu 15 untuk 75 Hari Operasi;
- b) Indeks operasi speedboat pengawas dengan target 92,25 didapat dari pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas Napoleon 017 dan Napoleon 039 untuk 21 Hari Operasi masing-masing unit;
- c) Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP didapat dari pelaksanaan perawatan 3 (tiga) unit armada pengawasan.

6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini terdiri dari:

-
- a) Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan target 82% untuk pelaksanaan penanganan 3 (tiga) perkara sanksi administratif;
 - b) Indeks pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dengan target 82%.
7. *Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan.*

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 82% untuk pelaksanaan penanganan 6 (enam) perkara;

8. *Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan SDKP.*

Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Kegiatan ini ada 10 (sepuluh) komponen indikator yaitu:

- a) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan target tahun 2026 adalah 81,75. Capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan nilai realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber data perhitungan capaian indikator ini berasal dari aplikasi Monev Kemenkeu;
- b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 92,1 %. Capaian indikator kinerja ini adalah proses evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi. Sumber data untuk instrumen nilai berasal dari website online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Kementerian Keuangan RI;
- c) Indeks Profesionalitas ASN dengan indeks target 81,5 yang diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Sumber data yang menjadi instrumen pencapaian adalah aplikasi MyASN;
- d) Penilaian Mandiri SAKIP dengan target nilai 88,2 yang merupakan rangkaian catatan informasi untuk verifikasi pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja UPT;
- e) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 100%;
- f) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan target 86%

-
- g) Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik dengan nilai indeks target 88,8. IK ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan. Survey dilakukan selama 4 (empat) kali yaitu triwulan I, II, III dan IV tahun 2026;
 - h) Nilai pengawasan kearsipan internal dengan target 75, didapat dari kegiatan penilaian kearsipan lingkup DJPSDKP;
 - i) Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna, dengan target nilai 78;
 - j) Nilai implementasi program budaya kerja dengan target 71, merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan satker, hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker;

Rencana aksi atas kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2026 dapat dilihat pada tabel Rencana Aksi Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2026 pada lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2026 ini disusun dengan menjabarkan secara detail dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Ditjen PSDKP di tahun 2026 dan khususnya dukungan terhadap pencapaian target rancangan teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP tahun 2025-2029.

Perlu disadari bahwa keberhasilan program dan kegiatan pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna merupakan *resultante* dari keberhasilan bersama sebagai stakeholder pengawasan perikanan di Stasiun PSDKP Tahuna sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2026, sehingga hasilnya dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar tolok ukur dalam evaluasi pelaksanaannya.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenlyf Jimmy Wuwung

Jabatan : Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Tahuna

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

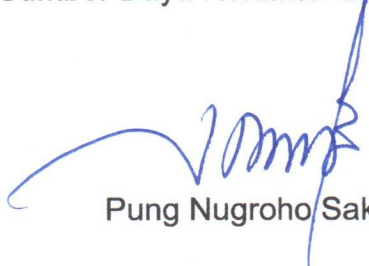
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna



Jenlyf Jimmy Wuwung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas [Indeks];	83
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan [Nilai];	100
		3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan [Nilai];	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan [Nilai];	83
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan [Nilai];	83
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas [Indeks];	92,25
		7. Indeks operasi speedboat pengawas [Indeks];	92,25
		8. Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP [Indeks];	100
6.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan [Indeks];	82
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan [Indeks];	82
7.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [Indeks];	82
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	81,75
		13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	92,1
		14. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna (Indeks)	81,5
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	88,2
		16. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis	100

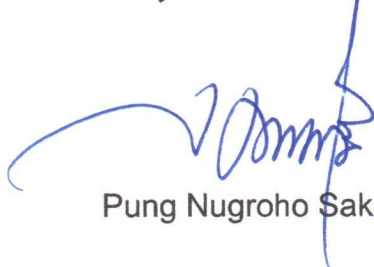
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tahuna [%];	
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%];	86
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	88,8
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	75
		20. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	78
		21. Nilai implementasi Program Budaya Kerja [Nilai]	71

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	8.442.051.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	808.649.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	152.962.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	81.960.000
2.	Program Dukungan Manajemen	6.456.262.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2026		15.941.884.000

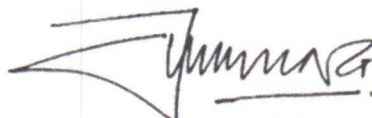
Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

Jenlyf Jimmy Wuwung

Lampiran 1 : Fokus dan Jadwal Kegiatan Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2026

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
JUMLAH			15.635.902												
'032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		9.179.640												
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		8.426.866												
2350.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	75 HO	184.650												
2350.BHD.001	Operasional Awak Kapal Pengawas		184.650												
052	Pelaksanaan Operasional Awak Kapal Pengawas		184.650												
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	75 HO	5.216.690												
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas		4.965.338												
051	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas		7.740	√											
052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas		4.949.858	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas		7.740											√	√
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas		251.352												
'051	Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas		3.750	√											
'052	Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas		243.489	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas		4.113							√					√
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 UNIT	3.025.526												
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat		3.025.526												
'051	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		430	√	√										
'052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		3.024.666	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		430							√				√	√
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		535.299												
2351.BCE	Penanganan Perkara	9 PERKARA	535.299												
2351.BCE.002	Perkara Kelautan yang dikenakan sanksi administratif		31.552												
051	Persiapan perkara kelautan yang dikenakan sanksi		1.215											√	
052	Pelaksanaan perkara kelautan yang dikenakan sanksi administratif		28.803											√	
053	Monitoring dan evaluasi perkara kelautan yang dikenakan sanksi		1.534											√	
2351.BCE.003	Perkara perikanan yang dikenakan sanksi administratif		36.609												
051	Persiapan perkara perikanan yang dikenakan sanksi		2.430											√	
052	Pelaksanaan perkara perikanan yang dikenakan sanksi administratif		31.149											√	
053	Monitoring dan evaluasi perkara perikanan yang dikenakan sanksi		3.030											√	
2351.BCE.004	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana		467.138												
051	Ekspose Awal TPKP		13.680									√	√	√	
052	Pemberkasan Perkara TPKP		232.058									√	√	√	
054	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP		35.640									√	√	√	
055	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP		185.760									√	√	√	

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		135.515												
2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam[Base Line]	1 KEG	57.225												
2352.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		57.225												
051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		924	√											
052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		55.845							√	√	√			
053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		456											√	
2352.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan[Base Line]	2 LEMBAGA	2.806												
2352.BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		2.806												
051	Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		225	√											
052	Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		2.356		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
053	Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		225											√	
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7 LEMBAGA	75.484												
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya		17.198												
051	Perencanaan / persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		675	√											
052	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		15.173		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
053	Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		1.350											√	√
2353.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya		58.286												
052	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan		58.286		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan		81.960												
2353.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4 KLMPK	81.960												
2353.QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas		81.960												
051	Perencanaan pembinaan POKMASWAS		1.400	√											
052	Pelaksanaan Pembinaan POKMASWAS		79.160							√	√	√			
053	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan		1.400											√	
'032.05.WA	Program Dukungan Manajemen		6.456.262												
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		6.456.262												
2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 UNIT	15.000												
2355.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		15.000												
'051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		15.000				√								
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 LAYANAN	6.416.785												
2355.EBA.962	Layanan Umum		65.684												
051	Layanan umum rumah tangga		65.684	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.994	Layanan Perkantoran		6.342.592												
001	Gaji dan Tunjangan		4.958.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.384.592	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
2355.EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal		4.765												
052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat		4.765					√							
2355.EBA.Z07	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal		3.744												
052	Pelaksanaan Pengelolaan BMN		3.744					√							
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2 ORANG	3.917												
2355.EBC.Z13	Layanan Manajemen SDM		3.917												
052	Pelaksanaan Manajemen SDM Aparatur		3.917	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 DOKUMEN	20.560												
2355.EBD.Z27	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		6.960												
052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan		6.960	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		2.560												
052	Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Satker		2.560	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal		11.040												
052	Pelaksanaan Manajemen Kinerja		11.040	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

Jenlyf Jimmy Wuwung, S.Kel

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	SATUAN TARGET	TARGET KEGIATAN BERKALA											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
SK.1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas;	Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Penyelenggaraan Pembinaan POKMASWAS	81.960.000	4	Kelompok						2	4	4	4	4	4
SK.2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;	2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan;	Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK	Pelaksanaan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	60.225.000	1	Operasi								1	1	1	1
		3	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan;	Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP	Pelaksanaan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	-	1	Operasi											1
SK.3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK	Pemeriksaan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	6.954.000	1	Lembaga			1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Pemeriksaan unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	19.538.000	4	Lembaga	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4
SK.4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP	Pemeriksaan Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	66.245.000	27	Lembaga			3	6	9	12	15	18	21	24	27
SK.5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP	6	Indeks operasi kapal pengawas	Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Operasi Kapal Pengawas	4.965.338.000	75	Hari Operasi				10	20	35	35	35	50	65	75
					Pelaksanaan operasional awak kapal pengawas	199.835.000	75	Hari Operasi				10	20	35	35	35	50	65	75
		7	Indeks operasi speedboat pengawas	Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Operasi Speedboat Pengawas	251.352.000	21	Hari Operasi			5	10	10	10	15	15	15	21	21
		8	Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP	Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	3.025.526.000	3	Unit			1	2	3	3	3	3	3	3	3
SK.6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	Tim Kerja Penanganan Pelanggaran	Penyelesaian Perkara Kelautan yang dikenakan sanksi administratif	49.870.000	1	Perkara					1	1	1	1	1	1	1
					Penyelesaian Perkara Perikanan yang dikenakan sanksi administratif	61.957.000	2	Perkara				1	1	1	1	1	2	2	2
		10	Indeks pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tim Kerja Penanganan Pelanggaran	Penyelesaian Perkara Perikanan yang dikenakan sanksi administratif	61.957.000	2	Perkara				1	1	1	1	1	2	2	2
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Tim Kerja Penanganan Pelanggaran	Penyelesaian Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	696.822.000	6	Perkara				2	2	2	4	4	6	6	6
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kinerja	11.040.000	1	Layanan									1	1	1
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kinerja	11.040.000	1	Layanan									1	1	1
		14	Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Layanan Administrasi Kepegawaian	3.917.000	2	Orang										2	2
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyelenggaraan Rekonsiliasi SAKIP	5.520.000	1	Layanan								1	1	1	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	SATUAN TARGET	TARGET KEGIATAN BERKALA											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		16 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan	6.960.000	1	Layanan										1	1	1
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan	6.960.000	1	Layanan										1	1	1
		18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kinerja	11.040.000	1	Layanan										1	1	1
		19 Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyelenggaran Penilaian Kearsipan	2.560.000	1	Layanan								1	1	1	1	1
		20 Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kinerja	11.040.000	1	Layanan										1	1	1
		21 Nilai implementasi Program Budaya Kerja	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kinerja	11.040.000	1	Layanan										1	1	1

Tahuna, 5 Januari 2026
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna


Jhelly Jimmy Wuwung, S.Kel